



BNN PROVINSI
JAWA TENGAH

**WARON
DRUGS**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

#JatengGayengPerangiNarkobaBarengBareng



@BnnProvJateng



BNN Provinsi Jawa Tengah



BNN PROV JATENG



infobnn_prov_jawatengah



bnn_provinsi_jawatengah

KATA PENGANTAR

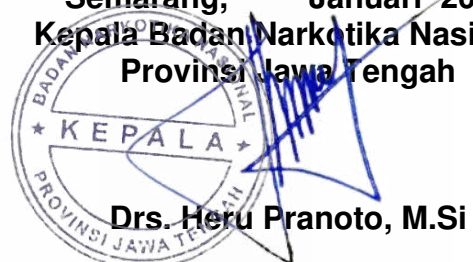
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat tersusun tepat waktu. Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicators*). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2022 yaitu yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan anggaran dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh staf, secara umum seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia, saya menyadari bahwa tantangan ke depan dalam upaya pelaksanaan P4GN ini semakin memerlukan upaya kerja keras dari seluruh personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN pada tahun mendatang. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Jawa Tengah



Drs. Heru Pranoto, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan unit eselon II mandiri yang berkedudukan di Provinsi yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan melalui pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi target kinerja ditetapkan melalui Sasaran Strategis:

- 1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.**
- 2. Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional, Produktif, dan Proporsional serta berkinerja tinggi.**

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama secara ringkas dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar Rp.34.401.700.237,- atau sebesar 99.51%;
2. Dari 19 Indikator Kinerja Kegiatan, sebanyak 8 melebihi target, 7 sesuai dengan target dan 4 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan;
3. Sisa anggaran merupakan efisiensi dari Belanja Barang dan Belanja Pegawai.
4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Penyelarasan jadwal kegiatan dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - b. Membagi kewenangan dengan membuat Zonasi P4GN bagi BNNK untuk mengampu Kota/Kabupaten terdekat;
 - c. Melaksanakan distribusi tugas lintas seksi untuk menciptakan tim kerja yang solid di setiap Bagian/Bidang di lingkungan BNNP Jawa Tengah;
 - d. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas aparat penegak hukum dan membuat aturan bersama lintas aparat penegak hukum dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN dalam hal penanganan pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
 - g. Optimalisasi Pendidikan pelatihan bagi personil BNNP Jawa Tengah;
 - h. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis teknologi sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN LAPORAN KINERJA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Analisis Capaian Sasaran	10
B. Akuntabilitas Keuangan	46
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNN Provinsi bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara efektif di daerah Program Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN dan Advokasi, Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, sementara Bidang Rehabilitasi melakukan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba serta Pascarehabilitasi Penyalahguna Narkoba.

Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Alami, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sintetis, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor,

Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran dan Pengawasan dan Perawatan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika serta Pengelolaan Aset.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja eselon II mandiri yang berada di wilayah, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas dan fungsinya, Laporan pertanggungjawaban dimaksud dinamakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini akan menjelaskan dan menggambarkan kinerja atau hasil yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun anggaran terkait dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya RKT tersebut dikukuhkan dalam satu dokumen perjanjian kinerja antara Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Penanggungjawab kegiatan.

Laporan realisasi dan capaian target setidaknya menggambarkan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja. Penyajian tingkat keberhasilan dan kegagalan unit kerja diuraikan secara gamblang, agar penerima manfaat dapat mengetahui sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan. Keberhasilan atau kegagalan mencapai target diuraikan agar penerima manfaat dapat mengetahui adanya faktor pendorong dan penghambat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNNK;
- d. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan program dan anggaran BNNP;
- f. Pelaksanaan administrasi.

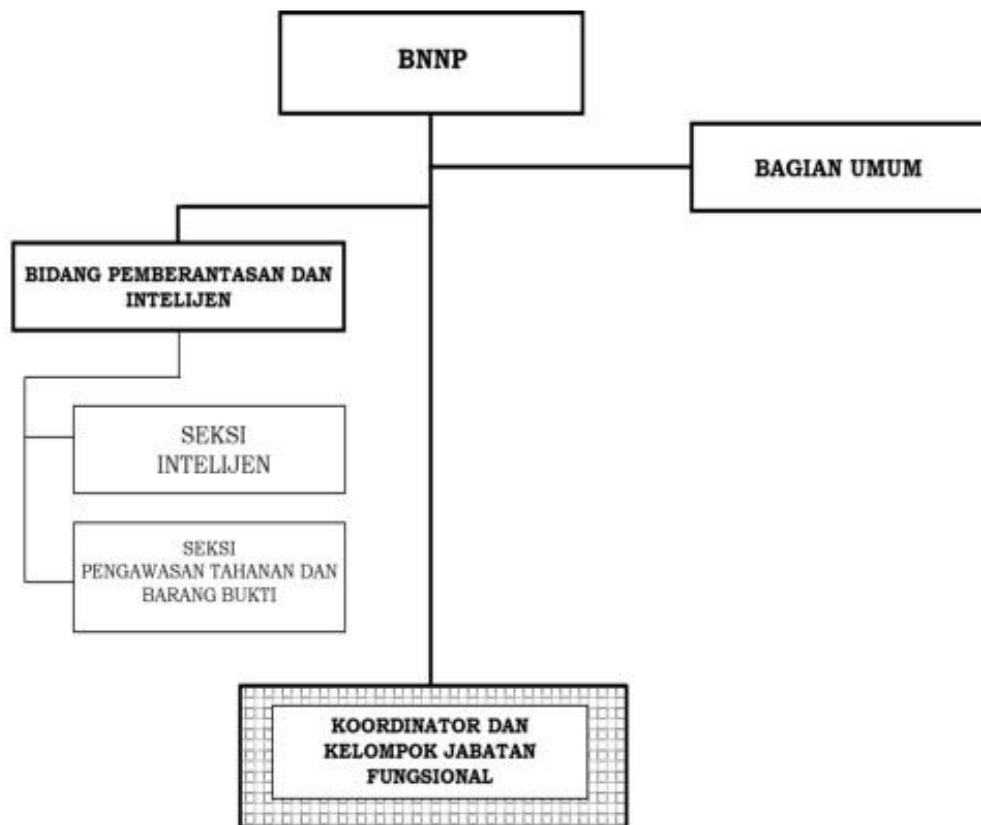
4. Kewenangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi.

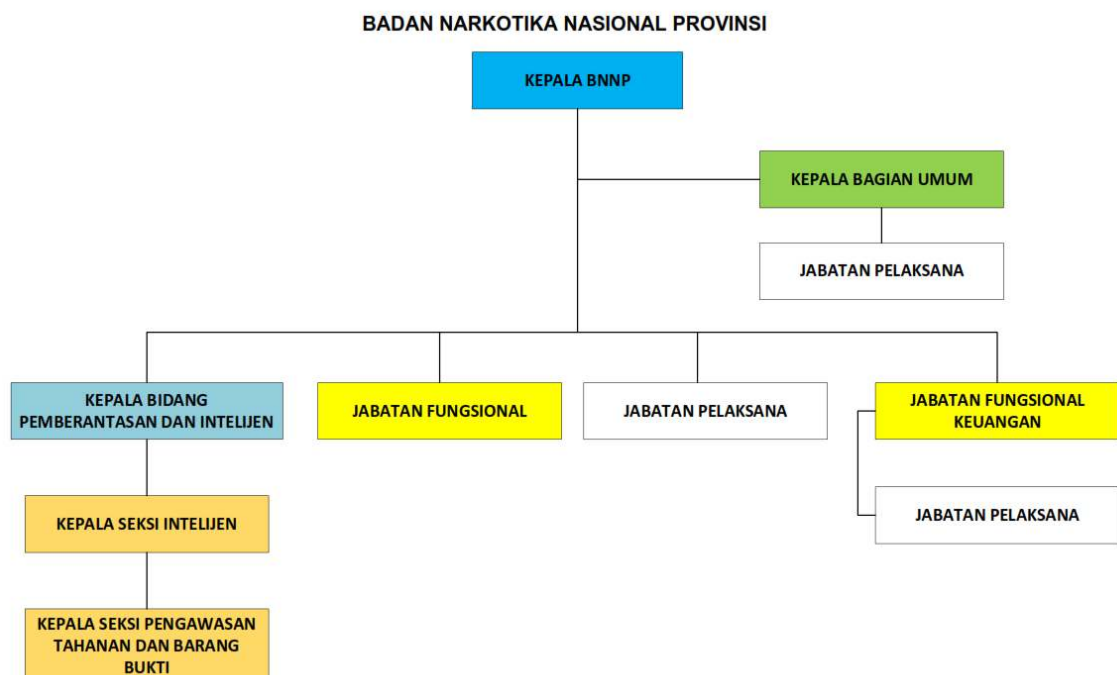
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 1.1 diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Bagian Umum;
- 3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi BNN Provinsi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:KEP/175/II/KA/KP.07.00//2022/BNN tanggal 15 Februari 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional di Badan Narkotika Nasional Provinsi Peta Jabatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Peta Jabatan BNN Provinsi

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Jawa Tengah, antara lain Gambaran Umum, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang Rencana Strategis/Rencana Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas tentang penetapan kinerja tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan analisis pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

Bab IV Penutup

Bab V Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan kontrak kinerja pimpinan unit kerja dengan memperhatikan penetapan kinerja yang berisikan atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai. Dijelaskan dalam variabel Perjanjian Kinerja:

b. Sasaran kegiatan

Produk akhir (keluaran akhir) yang dihasilkan dari serangkaian proses yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran program.

c. Indikator kinerja kegiatan

Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

d. Target kinerja

Menunjukkan tingkat indikator kinerja sasaran kegiatan.

Atas dasar variabel tersebut di atas Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota
2		Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		dan peredaran gelap narkoba		
3		Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/ Kota
4		Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,40 Indeks
5		Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
6		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit
7		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,40 Indeks
8		Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
9		Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	19 Berkas Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		tanaman terlarang lainnya		
10		Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
11		Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas Perkara
12	Terwujudnya manajemen Organisasi Profesional, produktif, dan proposional serta berkinerja tinggi	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	89 Indeks
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 Kabupaten/Kota
13		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	95 Indeks
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/Kota

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2022 mempunyai 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dimana sasaran kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran strategis program pada masing-masing kedeputian BNN RI dengan 19 (sembilan belas) indikator kegiatan kinerja yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) dan jumlah target yang diperjanjikan dimana Penetapan Kinerja tersebut diturunkan (*cascading*) ke 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sehingga capaian *outcome* merupakan kompilasi dari BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 atas pencapaian sasaran maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang telah ditetapkan beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Pada tahun 2022 indikator yang dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA BNN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	4 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	225%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	4 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	225%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan	2 Kawasan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	3,40 Indeks	3,25 Indeks	95,58%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang	65 Orang	108%
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	8 Orang	80%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	5 Lembaga	125%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit	13 Unit	108,3%
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,40 Indeks	3,488 Indeks	102,58%
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan	100%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	19 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	126,31%
10	Meningkatnya pengawasan	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100 Indeks	100%
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara	100%
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	89 Indeks	81,74 Indeks	91,84%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 Kabupaten/Kota	8 Kabupaten/Kota	88,88%
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	95 Indeks	96,56 Indeks	101,64%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	100%

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran BNN Kabupaten/Kota selama tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian periode selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian diuraikan analisa capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas P4GN sebagai berikut:

1	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba

berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan target capaian 4 (empat) Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
1	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	225%

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PIE)

Definisi Operasional

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PIE) bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di tahun 2022 ini, BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 4 BNN Kab/Kota dengan indeks ketahanan diri remaja (DEKTARI) terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi (51).

Hasil

Indeks Ketahanan Diri Remaja diukur dengan menggunakan skala indeks ketahanan diri. Di BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki satu program prioritas nasional yaitu Pelatihan Softskill di SMP sederajat, sedangkan di BNNK memiliki program Dialog Interaktif Remaja. Indeks ketahanan diri sendiri dapat diukur dengan melakukan kegiatan Soft Skill SMP dan Informasi Edukasi pada Remaja dalam bentuk talkshow (untuk di BNNP dan atau BNNK), serta melalui kegiatan dialog interaktif remaja (di BNN Kabupaten/Kota). Untuk kegiatan dialog interaktif remaja sendiri dilaksanakan sebanyak 10 kali kegiatan dan di akhir kegiatan baru dapat mengisi indeks ketahanan diri remaja. Sedangkan di BNNP sendiri, indeks ketahanan diri dilakukan dengan mengambil sampel dari kegiatan informasi dan edukasi P4GN melalui tatap muka baik secara langsung maupun virtual. BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki target 4 Kab/Kota dengan realisasi 9 Kab/kota rata-rata Dektari Provinsi Jateng 55,14 berkategori Sangat Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

CAPAIAN DEKTARI BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2021-2022

SATUAN KERJA	DEKTARI PER DESEMBER 2021	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2021	DEKTARI PER DESEMBER 2022	KATEGORI DEKTARI PER DESEMBER 2022
BNN Provinsi Jawa Tengah	53,81	Sangat Tinggi	55,38	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Temanggung	53,69	Sangat Tinggi	54,85	Sangat Tinggi
BNN Kota Tegal	56,37	Sangat Tinggi	56,18	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Banyumas	50,19	Tinggi	56,42	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Cilacap	53,69	Sangat Tinggi	55,71	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Kendal	50,46	Tinggi	56,46	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Batang	53,82	Sangat Tinggi	52,68	Tinggi
BNN Kabupaten Purbalingga	49,68	Rendah	58,23	Sangat Tinggi
BNN Kabupaten Magelang	53,77	Sangat Tinggi	53,19	Tinggi
BNN Kota Surakarta	53,67	Sangat Tinggi	52,35	Tinggi
DEKTARI PROVINSI JATENG	52,92	Tinggi	55,14	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan capaian nilai Dektari BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran dari Tahun 2021 semula 52,92 dengan kategori Tinggi, pada Tahun 2022 menjadi 55,14 dengan kategori Sangat Tinggi, hal tersebut dikarenakan terdapatnya pembekalan dari BNN Provinsi Jawa Tengah terhadap BNN Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, selain itu adanya pendampingan dari Bidang/Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat baik dari BNN Provinsi Jawa Tengah maupun dari BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada saat pengisian kuesioner Indeks Ketahanan Diri.

Kendala

Indeks Ketahanan Diri Remaja dapat diukur setelah peserta memperoleh informasi dan edukasi P4GN, sehingga harus terlaksana terlebih dahulu kegiatan baru dapat diukur. Pengukuran sendiri dilakukan dengan menginput kuesioner ketahanan diri remaja yang sudah ditentukan oleh BNN RI. Namun data akhirnya baru dapat diperoleh ketika seluruh kegiatan DIPA 2022 selesai dilaksanakan, dan BNNP/BNNK mengisi Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun.

Strategi

Berkoordinasi dengan BNNK agar segera menyelesaikan penginputan Dektari dan berkoordinasi dengan BNN RI terkait hasil angka dektari.

2	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya diimplementasikan pada indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
2	Jumlah kabupaten/ kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	4 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	225%

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Advokasi)

Definisi Operasional

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di tahun 2022 ini, BNN Provinsi Jawa Tengah memperoleh target 4 BNN Kab/Kota dengan indeks ketahanan keluarga (DEKTARA) terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi. Untuk di BNN Provinsi sendiri, rangkaian kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga terdiri dari Rapat Koordinasi, Koordinasi ke BNNK dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga. Di BNN Kabupaten/Kota juga memiliki angka yang sama. Angka ketahanan diri keluarga ini dapat terukur ketika rangkaian kegiatan dari rapat hingga fasilitasi selesai dilaksanakan.

Hasil

Hasil indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi (minimal 78,67) diperoleh dari data perhitungan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil laporan BNNK dan pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Jawa Tengah, keseluruhan BNNK telah menyelesaikan rangkaian kegiatan ketahanan keluarga, mulai dari rapat koordinasi hingga fasilitasi ketahanan keluarga tahap 1-4. Dengan capaian pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4

CAPAIAN IKK BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2021-2022

SATKER	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2021	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2021	NILAI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2022	KATEGORI INDEKS KETAHANAN KELUARGA (IKK) Tahun 2022
BNN Provinsi Jawa Tengah	89.73	Sangat Tinggi	75,268	Rendah
BNN Kab Temanggung	75.44	Rendah	90,714	Sangat Tinggi
BNN Kota Tegal	83.30	Tinggi	86,071	Tinggi
BNN Kab Banyumas	75.53	Rendah	85,089	Tinggi
BNN Kab Cilacap	85.44	Sangat Tinggi	88,839	Sangat Tinggi
BNN Kab Kendal	81.42	Tinggi	89,464	Sangat Tinggi
BNN Kab Batang	78.75	Tinggi	84,018	Tinggi
BNN Kab Purbalingga	85.17	Sangat Tinggi	89,375	Sangat Tinggi
BNN Kab Magelang	84.55	Sangat Tinggi	90,536	Sangat Tinggi
BNN Kota Surakarta	82.14	Tinggi	85,982	Tinggi

Dari tabel diatas dapat diketahui di BNN Provinsi tahun 2022 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja yaitu: Target indeks ketahanan keluarga (DEKTARA) terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi memiliki target 4 Kabupaten/kota dengan realisasi 9 Kabupaten/Kota. Mengalami peningkatan dari capaian tahun 2021 dengan realisasi 7 Kabupaten/Kota yang target indeks ketahanan keluarga (DEKTARA) terhadap penyalahgunaan narkoba-nya mencapai kategori tinggi. Dapat diartikan bahwa meningkatnya daya tangkal keluarga di wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena adanya intervensi/ pembinaan keluarga dari BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah

Kendala

Data baru dapat diperoleh pada akhir kegiatan, karena merupakan satu rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dan baru dapat dihitung jika kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Link untuk input sendiri baru di share sekitar bulan September awal, dan saat ini baik BNNP maupun BNNK sedang dalam proses input. Hasil angka ketahanan diri juga tidak bisa diketahui oleh BNNP karena proses pengolahan data kuesioner dikelola oleh BNN RI.

Strategi

Mendorong BNN Kabupaten/Kota untuk segera menginput kuesioner ketahanan keluarga serta berkoordinasi dengan BNN RI terkait input dan hasil kuesioner ketahanan keluarga.

3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
3	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi Jawa Tengah	9 Kabupaten/ Kota	9 Kabupaten/ Kota	100%

Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga Yang Berpartisipasi Aktif Dalam Mewujudkan IKOTAN (Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba)

Definisi Operasional

Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang di sebut (KOTAN) adalah Kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba di 4 (empat) lingkungan sasaran yaitu lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. BNN Provinsi Jawa Tengah mendapatkan target Tahun 2022 adalah sebanyak 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota, dan penilaian KOTAN dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga,
2. Ketahanan masyarakat,
3. Kewilayahan,
4. Kelembagaan dan,
5. Hukum.

Hasil

Kebijakan KOTAN bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. Dilaksanakan dengan pendekatan integratif-kolaboratif antar sektor pembangunan di daerah yang berorientasi pada upaya penanggulangan narkoba di tingkat wilayah kabupaten/kota.

Di beberapa kabupaten/kota di wilayah provinsi jawa tengah sudah melaksanakan rapat kerja dan workshop penggiat narkoba.

Kendala

- Masih dalam keadaan Pandemi Covid 19 yang khususnya di Provinsi Jawa Tengah sedang terjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga terlambat dilaksanakannya kegiatan mengumpulkan masyarakat (tatap muka).
- Belum terdapatnya juknis yang jelas tentang cara penilaian Indeks KOTa Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN).

Strategi

Melakukan pemetaan sasaran dan melakukan koordinasi awal kepada instansi terkait, sementara menunggu juknis kegiatan.

4	Sasaran Strategis	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Beralih Status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” dengan target 2 Kawasan serta Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi dengan target 3,40.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
4	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Beralih Status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	2 Kawasan	2 Kawasan	100%
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	3,40	3,25	95,58%

Fasilitas Dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Yang Beralih Status Dari Bahaya Menjadi Waspada Dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi.

Definisi Operasional

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif kawasan rawan di tahun 2022 sampai dengan triwulan IV sudah terlaksana sampai dengan kegiatan bimbingan teknis lifeskill bagi masyarakat rawan di kelurahan Purwoyoso dengan pelatihan berupa pelatihan dasar keterampilan las dan menyerahkan perlengkapan dasar keterampilan las dan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada triwulan IV. Selanjutnya kegiatan pemberdayaan alternatif di kelurahan Joyotakan kota Surakarta dengan pelatihan dasar keterampilan las dan menyerahkan perlengkapan dasar keterampilan las.

Hasil

Terbentuknya masyarakat yang mempunyai keterampilan sehingga dapat menolak terhadap penyalahgunaan peredaran gelap dan narkoba yang berada di dalam suatu wilayah.

Kendala

Sulitnya mempengaruhi warga untuk melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Strategi

Diupayakan pendekatan melalui aparat kelurahan, babinsa, babinkamtibmas dan tokoh masyarakat toga setempat.

5	Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang	65 Orang	108%
	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	8 Orang	80%

Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih

Definisi Operasional

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai petugas Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah terlatih dan bisa melakukan layanan rehabilitasi kepada masyarakat di Unit Intervensi Berbasis Masyarakat.

Adapun pengukuran indikator “Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” diukur dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM.

Hasil

Target 2022 jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 60 orang yang tersebar di wilayah kerja BNNP dan BNNK. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 65 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
CAPAIAN PETUGAS IBM TERLATIH
BNN PROVINSI JAWA TENGAH DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2021-2022

SATUAN KERJA	2021		2022	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
BNNP Jawa Tengah	15	15	15	15
BNNK Cilacap	5	5	5	10
BNNK Kendal	5	5	5	5
BNNK Batang	5	5	5	5
BNNK Purbalingga	5	5	5	5
BNNK Temanggung	5	5	5	5
BNNK Tegal	5	5	5	5
BNNK Banyumas	5	5	5	5
BNNK Surakarta	5	5	5	5
BNNK Magelang	5	5	5	5
TOTAL	60	60	60	65

Pelaksanaan IBM telah selesai. Seluruh agen pemulihan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan materi yang telah didapatkan saat bimbingan teknis petugas IBM. Jumlah agen pemulihan yang mendapat pelatihan sebanyak 65 orang, namun untuk pelaksanaan layanan IBM jumlah agen pemulihan yang terlibat sebanyak 88 orang.

Kendala

Pada dasarnya pelaksanaan IBM di beberapa daerah wilayah Jawa Tengah seringkali menghadapi kendala dikarenakan Agen Pemulihan yang memiliki kesibukan.

Strategi

Pelaksanaan layanan mengikuti jadwal agen pemulihan yang telah disepakati Bersama dengan klien IBM.

Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis

Definisi Operasional:

Petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang tersertifikasi kompetensi teknis di bidang layanan rehabilitasi kepada penyalah guna dan atau pecandu narkoba.

Adapun pengukuran indikator “Petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis” dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi

narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Target petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dapat terpenuhi apabila kegiatan uji sertifikasi kompetensi konselor adiksi telah dilaksanakan.

Hasil

Target 2022 jumlah Petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak 10 orang yang berasal dari BNNP, BNNK, lembaga mitra milik BNNP dan BNNK. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 8 orang.

Kendala

Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan September. Jumlah peserta yang mengikuti uji sertifikasi sebanyak 15 orang, dari 15 orang yang dinyatakan kompeten dan berkasnya akan diajukan dalam rapat pleno sebanyak 10 orang, namun dari hasil rapat pleno yang dinyatakan kompeten sebanyak 8 orang. Hal ini dikarenakan beberapa peserta belum cukup matang dalam mempersiapkan mengikuti uji dan perbedaan pemberian layanan serta form yang digunakan dengan standard dalam uji.

Strategi

Dalam pelaksanaan uji sertifikasi di tahun berikutnya akan dilaksanakan bimbingan pra uji sertifikasi.

6	Sasaran strategis	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	5 Lembaga	125%
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah	12 Unit	13 Unit	108,3%

Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi

Definisi

Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah lembaga rehabilitasi yang melakukan layanan rehabilitasi kepada penyalah guna dan

atau pecandu narkoba sesuai dengan Standard pelayanan yang ditetapkan oleh BNN dan atau Standard pelayanan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 8807:2019. Adapun pengukuran indikator “Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)” dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standard layanan dalam satu tahun anggaran.

Hasil

Target 2022 jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 4 lembaga. Dari 7 lembaga yang diajukan dalam penilaian SPM/ SNI regular tahun 2022 terdapat 5 lembaga yang telah memenuhi syarat. Berikut hasil dari penilaian SPM/ SNI regular Rincian 12 (dua belas) unit IBM yang ada di wilayah Jawa Tengah terdiri dari:

Tabel 6

LEMBAGA REHABILITASI MEMENUHI SYARAT SPM

NO	NAMA LEMBAGA	SETTINGAN LAYANAN	KATEGORI NILAI
1	RSJD. Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Rawat Inap Medis	A
2	RSJD. Prof. Dr. Soerojo Magelang	Rawat Inap dan Rawat Jalan Medis	B
3	Klinik Pratama Rawat Jalan Adiksia Medika BNNK Banyumas	Rawat Jalan Medis	B
4	Klinik Pratama Rawat Jalan “SEHATI” BNNK Cilacap	Rawat Jalan Medis	B
5	Klinik Pratama Bina Sehat BNNK Magelang	Rawat Jalan Medis	B

Kendala

BNNP memiliki target SPM namun arahan dari pusat untuk dijadikan SNI regular, sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis masih menggunakan form SPM.

Strategi

Memindahkan form SPM ke dalam form SNI.

Lembaga Rehabilitasi Mitra BNNK Yang Operasional

Target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal adalah target BNNP Jawa Tengah, sedangkan BNNK memiliki target lembaga rehabilitasi yang operasional. Berikut lembaga rehabilitasi mitra BNNK yang operasional:

Tabel 7
LEMBAGA REHABILITASI MITRA BNNK OPERASIONAL

NO	WILAYAH	LEMBAGA	JUMLAH KLIEN	KETERANGAN
1	BNNK Batang	RS H. A. Zaky Djunaid	45	IPWL
2	BNNK Magelang	RS Aisyiyah Muntilan	3	Non IPWL
		Panti Rehabilitasi Betesda	2	Non IPWL
3	BNNK Cilacap	Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Narkoba Tambihul Ghofilin	23	Non IPWL
		Klinik Karlina	1	Non IPWL
		Klinik PKU Muhammadiyah Sampang	3	Non IPWL
4	BNNK Purbalingga	YPI Nurul Ichsan al Islami	30	IPWL
		Klinik Utama Rawat Inap H. Mustajab	9	Non IPWL
		Yayasan Annur H. Supono	36	IPWL
5	BNNK Temanggung	RSUD Temanggung	0	Non IPWL
6	BNNK Tegal	RSUD Kardinah	0	Non IPWL
		RS Mitra Siaga	0	Non IPWL
		RSIU Harapan Anda	0	Non IPWL
		Puskesmas Tegal Timur	0	Non IPWL
		Klinik Aisyiah Siti Hajar	0	Non IPWL
7	BNNK Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	41	IPWL
		RSUD Banyumas	25	IPWL
		RSU Siaga Medika	9	Non IPWL
		Sentra Satria Baturraden	36	IPWL
		Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Hikmah	8	Non IPWL
8	BNNK Surakarta	Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa	142	IPWL
		RSJD Arif Zainuddin	114	IPWL
		RSUD dr. Moewardi	16	IPWL
		Yayasan L-Paska	20	IPWL
		Yayasan Anargya Sober House	16	IPWL
		RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	43	Non IPWL
		Klinik Imron Medika	0	Non IPWL

Kendala

1. BNNK Magelang

- a. RS Aisyiyah belum memiliki poli Napza dan jumlah SDM terbatas.
- b. Panti Rehabilitasi Betesda jumlah SDM nya terbatas, terutama yang sudah mendapatkan pelatihan.

2. BNNK Cilacap

BNNK Cilacap memiliki mitra 3 lembaga yang ada permasalahan diantaranya:

- a. Klinik PKU Muhammadiyah belum beroperasi dan SDM yang terlatih sangat terbatas serta belum memiliki konselor
- b. Klinik Karlina belum beroperasi dan adanya permasalahan internal klinik (perubahan penanggungjawab klinik dan petugas rehabilitasi)
- c. Panti rehabilitasi sosial gangguan jiwa dan narkoba tambihul ghofilin beroperasi namun ada masalah internal manajemen, diantaranya ada rencana perubahan yayasan yang menaungi panti.

Strategi

1. BNNK Magelang

- a. Layanan rehabilitasi di RS Aisyiyah dilakukan di Poli Jiwa.
- b. Melakukan bimbingan teknis ke RS Aisyiyah dan Panti Rehabilitasi Betesda.

2. BNNK Cilacap

Menyampaikan agar BNNP mengikutsertakan pelatihan asesmen dan konseling serta mengupayakan untuk pelatihan online dari lembaga pelatihan lain selain BNN

Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Di Wilayah

Definisi

Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang dibentuk sebagai bagian dari Program Desa Bersinar.

Adapun pengukuran indikator “Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)” dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan

pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Hasil

Target 2022 jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebanyak 14 unit terdiri dari 3 unit di Kota Semarang, 1 unit di Kabupaten Kendal, 1 unit di Kabupaten Batang, 1 unit di Kota Tegal, 1 unit di Kabupaten Temanggung, 1 unit di Kabupaten Purbalingga, 1 unit di Kabupaten Banyumas, 3 unit di Kabupaten Cilacap, 1 unit di Kabupaten Magelang, 1 unit di Kota Surakarta. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 13 unit. Progress pelaksanaan layanan di Unit IBM :

1. BNNP Jawa Tengah

- a. IBM Pekunden Bersinar Kelurahan Pekunden

IBM Pekunden sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien dengan hasil berada pada fase tangguh

- b. IBM Marina Kelurahan Tawang Sari

IBM Marina sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien dengan hasil berada pada fase prima

- c. IBM Jelita Kelurahan Purwoyoso

IBM Jelita sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien dengan hasil berada pada fase tangguh

2. BNNK Cilacap

IBM yang terbentuk dan terlampir dalam Surat Keputusan Kepala BNN RI di wilayah BNNK Cilacap ada 3 unit yaitu IBM Barokah Desa Slarang, IBM Desaku Bersinar Desa Bulupayung dan IBM yang terdapat di Desa Plajan, namun yang menjadi Prioritas Nasional yaitu IBM Desaku Bersinar Desa Bulupayung. IBM Desa Slarang dan IBM Bulupayung sudah menjalankan layanan hingga tahapan bina lanjut, sedangkan Desa Plajan belum beroperasi. IBM Desaku Bersinar Desa Bulupayung dan IBM Desa Slarang berada pada fase prima dan IBM Desa Plajan berada pada fase rintisan.

3. BNNK Tegal

IBM yang terbentuk di BNNK Tegal ada 1 IBM yang bernama IBM Kelurahan Bandung. IBM tersebut sudah menjalankan layanan intervensi kepada 8 klien dengan hasil berada pada fase berkembang

4. BNNK Kendal

IBM yang terbentuk di BNNK Kendal ada 1 IBM yang bernama IBM Sambung Sari. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan dengan hasil berada pada fase Tangguh

5. BNNK Purbalingga

IBM yang terbentuk di BNNK Purbalingga ada 1 IBM yang bernama IBM Desa Meri. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan dengan hasil berada pada fase tangguh.

6. BNNK Batang

IBM yang terbentuk di BNNK Batang ada 1 yang bernama IBM Desa Kaliboyo. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien dengan hasil berada pada fase prima.

7. BNNK Temanggung

IBM yang terbentuk di BNNK Temanggung ada 1 yang bernama IBM Kelurahan Kebonsari. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan dengan hasil berada pada fase tangguh.

8. BNNK Banyumas

IBM yang terbentuk di BNNK Banyumas ada 1 yang bernama IBM Dawuhan Wetan. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan dengan hasil berada pada fase tangguh.

9. BNNK Surakarta

IBM yang terbentuk di BNNK Surakarta ada 1 yang bernama IBM Joyontakan. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan kepada 8 klien dengan hasil berada pada fase prima.

10. BNNK Magelang

IBM yang terbentuk di BNNK Magelang ada 1 yang bernama IBM Desa Pancuranmas. IBM sudah selesai menjalankan seluruh layanan dengan hasil berada pada fase Tangguh.

Kendala

Kesibukan Agen Pemulihan dan klien menjadi kendala pelaksanaan layanan IBM di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Strategi

Pelaksanaan layanan mengikuti jadwal agen pemulihan yang telah disepakati bersama dengan klien IBM.

7	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
7	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,4	3,488	102,58%

Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah

Definisi Operasional

Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi.

Adapun pengukuran indikator “Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi” Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrument kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.

Hasil

Target 2022 jumlah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi sebanyak 3,4 Indeks. Realisasi pada triwulan IV sebanyak 3,488 indeks.

Adapun untuk nilai indeks kepuasan masyarakat di tiap unsur, didapatkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 8

INDEKS KEPUASAN LAYANAN REHABILITASI BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	WILAYAH KERJA	TARGET	CAPAIAN	KLIEN YANG MENGISI KEPUASAN LAYANAN
1	BNNP Jateng	3,40 Indeks	3,338	33
2	BNNK Cilacap	3,20 Indeks	2,967	3
3	BNNK Kendal	3,20 Indeks	3,325	16
4	BNNK Batang	3,30 Indeks	3,792	12
5	BNNK Purbalingga	3,20 Indeks	3,370	5
6	BNNK Temanggung	3,20 Indeks	3,370	6
7	BNNK Tegal	3,20 Indeks	3,271	7
8	BNNK Banyumas	3,20 Indeks	3,488	12
9	BNNK Surakarta	3,20 Indeks	3,553	15
10	BNNK Magelang	3,20 Indeks	3,459	11

Kendala

1. BNNK Cilacap

- a. Mayoritas klien dibawah usia 18 Tahun sehingga Hanya sedikit klien yang masuk kriteria inklusi, belum bisa menggambarkan keseluruhan layanan.
- b. Aspek tahap perubahan klien mempengaruhi saat pengisian survei karena klien yang mengisi baru mendapat 2-3 kali layanan.

2. BNNK Tegal

Tools terlalu banyak sehingga klien dalam pengisian perlu didampingi.

3. BNNK Kendal

Tools terlalu banyak sehingga klien dalam pengisian perlu didampingi.

4. BNNK Magelang

Beberapa klien kesulitan mengisi survey secara online karena kendala device ataupun jaringan internet.

Strategi

1. BNNK Cilacap

Koordinasi dengan pembina fungsi terkait kondisi di BNNK Cilacap.

2. BNNK Tegal

Petugas mendampingi klien dalam pengisian survey agar klien tidak bingung.

3. BNNK Kendal

Petugas mendampingi klien dalam pengisian tools agar klien tidak bingung

4. BNNK Magelang

Melakukan pengisian survey secara manual dan selanjutnya di input ke dalam link survey online oleh petugas.

Selain indikator kerja yang tersebut dalam tabel di atas BNNP dan BNNK memiliki program rehabilitasi yang tertuang dalam DIPA BNN. Kegiatan yang termasuk dalam DIPA BNN berupa rawat jalan, asesmen medis, Skrining Intervensi Lapangan (SIL), SKHPN dan sebagainya. Berikut capaian pelaksanaan program tersebut :

Tabel 9
PROGRAM REHABILITASI BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	WILAYAH	TAR GET	CAPAIAN	SELESAI PROGRAM	RUJUK	DO	TAHAPAN BINA LANJUT
		ORANG					
1	BNNP Jateng	60	70	27	2	11	0
2	BNNK Cilacap	15	21	11	0	5	10
3	BNNK Kendal	15	18	18	0	0	16
4	BNNK Batang	15	35	12	1	2	12
5	BNNK Purbalingga	20	27	23	1	3	20
6	BNNK Temanggung	10	22	4	4	0	4
7	BNNK Tegal	15	15	15	0	0	15
8	BNNK Banyumas	35	46	25	3	12	10
9	BNNK Surakarta	20	22	5	1	3	7
10	BNNK Magelang	20	35	33	1	1	17
TOTAL		225	311	173	13	37	111

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah

Beberapa klien tidak menyelesaikan program rehabilitasinya (DO), dan 30 klien masih dalam proses rehab

2. BNNK Tegal

Ruang konseling kurang nyaman, plafond jebol dan wallpaper mengelupas

3. BNNK Cilacap

Izin operasinal masih dalam proses perpanjangan

4. BNNK Kendal

1. Klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk program rehabilitasi

2. Ada kegiatan – kegiatan di luar kegiatan rehabilitasi yang mengganggu jadwal klien untuk rehabilitasi

Strategi

1. BNNP Jawa Tengah

Menghubungi klien yang tidak kembali ke layanan

2. BNNK Tegal

Akan dilakukan perbaikan

3. BNNK Cilacap

Koordinasi dengan dinas terkait guna percepatan surat izin operasional

4. BNNK Kendal

1. Menghubungi keluarga/ mengingatkan klien tentang jadwal rehabilitasi
2. Membuat kesepakatan di luar jadwal

Tabel 10

**LAYANAN ASESMEN MEDIS, SKHPN, EVALUASI PSIKOLOGI TIPE A DAN TIPE B
BNNP DAN BNNK JAJARAN**

NO	SATUAN KERJA	ASESMEN MEDIS		SKHPN		EVALUASI PSIKOLOGI TIPE A		EVALUASI PSIKOLOGI TIPE B	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	BNNP Jawa Tengah	0	0	750	634	5	0	5	2
2	BNNK Kendal	0	0	300	320	0	0	0	0
3	BNNK Batang	0	0	400	316	0	0	0	0
4	BNNK Tegal	0	0	100	108	0	0	0	0
5	BNNK Purbalingga	0	0	150	153	0	0	0	0
6	BNNK Temanggung	0	4	100	100	0	0	0	0
7	BNNK Banyumas	0	0	250	230	0	0	0	0
8	BNNK Cilacap	2	2	100	109	0	0	0	0
9	BNNK Surakarta	0	0	300	280	0	0	0	0
10	BNNK Magelang	2	6	260	303	0	0	0	0
TOTAL		4	12	2710	2553	5	0	5	2

T: Target/R:Realisasi

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah

Belum ada yang mengakses layanan Evaluasi Psikologi Tipe A.

2. BNNK Surakarta

Pemohon SKHPN tidak rutin (tidak setiap hari ada).

3. BNNK Kendal

Bendahara pengeluaran belum memahami tugasnya dalam pencairan anggaran PNBK sehingga masih kesulitan dalam pencairan PNBK.

Strategi

1. BNNP Jawa Tengah

Koordinasi dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan evaluasi psikologi tipe A.

2. BNNK Surakarta

Melakukan sosialisasi layanan SKHPN.

3. BNNK Kendal

Terus berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran terkait pencairan dan pembuatan SPJ pencairan anggaran PNBPN yang ada dalam DIPA.

Tabel 11
SIL BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	WILAYAH	KLIEN YANG MENGAKSES LAYANAN SIL	KLIEN SIL YANG MENGIKUTI PROGRAM REHAB DI KLINIK	
			TARGET	CAPAIAN
1.	BNNP Jateng	2	2	2
2.	BNNK Kendal	13	10	13
3.	BNNK Batang	59	15	17
4.	BNNK Tegal	8	5	8
5.	BNNK Purbalingga	139	10	20
6.	BNNK Temanggung	10	10	10
7.	BNNK Banyumas	322	5	26
8.	BNNK Cilacap	15	15	15
9.	BNNK Surakarta	18	10	8
10.	BNNK Magelang	132	10	20
TOTAL		718	92	139

Kendala

1. BNNK Batang

Klien hasil SIL banyak yang hanya menggunakan minuman keras dan rokok.

2. BNNK Cilacap

a. Kesibukan petugas dengan tugas lain.

b. Anggaran SIL masuk dalam anggaran yang dilakukan Automatic Adjustment.

3. BNNK Surakarta

Klien masih ragu untuk mengakses layanan rehabilitasi di Klinik.

4. BNNK Kendal

a. Keluarga masih ketakutan ketika didatangi petugas.

b. Lokasi yang terkadang susah untuk dijangkau.

Strategi

1. BNNK Batang

Pemberian intervensi singkat yaitu edukasi tentang bahaya penggunaan narkoba, miras dan dampak negatif rokok.

2. BNNK Cilacap

- Koordinasi dengan relawan/penggiat P4GN disekitar daerah tersebut.
- Tetap melaksanakan SIL sambil menunggu pembukaan.

3. BNNK Surakarta

Menghubungi kembali klien yang telah dilakukan skrining.

a. BNNK Kendal

- Memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai tujuan kedatangan.
- Membuat janji di tempat yang mudah diakses.

Berikut realisasi anggaran Triwulan IV di wilayah kerja BNNP Jawa Tengah dan BNNK:

Tabel 12

REALISASI ANGGARAN REHABILITASI BNNP DAN BNNK JAJARAN

SATKER	3259 (000)			3260 (000)			3256 (000)			TOTAL		
	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
BNNP Jawa Tengah	191.895	191.244	99,7	371.057	338.180	91	40.328	40.077	99	603.280	569.502	94
BNNK Kendal	9.340	9.340	100	126.890	125.840	99	14.150	13.970	98,7	150.380	149.150	99
BNNK Batang	10.100	10.100	100	166.955	156.822	94	14.180	14.180	100	191.235	181.102	95
BNNK Tegal	9.510	9.509	99,9	86.128	86.072	99,9	17.500	17.500	100	113.192	113.081	99,9
BNNK Purbalingga	9.670	9.670	100	100.321	100.307	100	15.400	15.400	100	125.391	125.377	100
BNNK Temanggung	9.450	9.450	100	76.400	76.400	100	11.900	11.040	93	97.750	96.890	99
BNNK Banyumas	9.810	9.810	100	130.637	125.004	96	14.000	14.000	100	154.447	148.814	96
BNNK Cilacap	9.490	9.490	100	82.708	82.708	100	18.900	18.900	100	111.098	111.098	100
BNNK Surakarta	9.066	9.066	100	127.733	125.222	98	11.900	11.900	100	148.699	146.188	100
BNNK Magelang	10.060	10.060	100	142.514	137.472	96	15.400	15.400	100	167.974	161.932	97
TOTAL	278.391	277.739	99.8	1.411.343	1.354.027	95.9	173.658	172.367	99.3	1.863.446	1.641.202	88.1

P:Pagu/R:Realisasi

Kendala

1. BNNP Jawa Tengah

- Anggaran SKHPN tidak semuanya terserap.
- Belum ada yang mengakses layanan Evaluasi Psikologi Tipe A.

2. BNNK Kendal

- a. Klien klinik merasa sudah pulih dan tidak ada masalah dengan penyalahgunaan zat dan melanjutkan program rehabnya tidak sesuai jadwal, sehingga mempengaruhi serapan anggaran.
 - b. Sulit mengatur jadwal dengan klien IBM membuat perubahan jadwal kegiatan terganggu, sehingga mempengaruhi serapan anggaran.
3. BNNK Cilacap
- a. Izin operasional Klinik BNNK Cilacap berlaku s.d 20 Agustus 2022 masih dalam proses, terdapat masalah intern seperti pergantian penanggungjawab klinik mitra BNN dan perubahan yayasan yang menaungi panti rehabilitasi mitra BNN, terbatasnya pelatihan dan SDM klinik mitra BNN.
 - b. Kendala cuaca mempengaruhi jadwal yang telah disepakati dan kondisi kesehatan klien.
4. BNNK Surakarta
- a. Klien tidak mengikuti layanan sesuai jadwal, klien tidak mau mengakses layanan rehabilitasi.
 - b. Telah dilakukan layanan, tetapi anggaran belum di revolving.
 - c. Pemohon SKHPN tidak rutin, tidak selalu ada setiap hari.
 - d. Telah melakukan bimtek, lembaga mitra belum sesuai pemenuhan SNI.
 - e. Dalam proses bina lanjut untuk klien klinik dan layanan IBM.
5. BNNK Magelang
- LRKM kurang SDM yang terlatih.

Strategi

- 1. BNNP Jawa Tengah
 - a. Koordinasi dengan pembina fungsi
 - b. Sosialisasi adanya layanan evaluasi psikologi tipe A
- 2. BNNK Kendal
 - a. Memberikan pemahaman dan memotivasi pentingnya pemulihan
 - b. Mendampingi AP untuk menyusun rencana jadwal layanan IBM
- 3. BNNK Cilacap
 - a. Koordinasi dengan pembina fungsi terkait perubahan penanggungjawab klinik mitra BNN
 - b. Tetap jaga kesehatan dan dilakukan pemantauan secara online
- 4. BNNK Surakarta
 - a. Melakukan SIL dan menghubungi klien bila tidak datang sesuai jadwal serta memberikan motivasi kepada klien untuk tetap mengikuti layanan rehabilitasi

- b. Anggaran akan di revolving di bulan agustus 2022
 - c. Melakukan sosialisasi layanan SKHPN
 - d. Mendorong lembaga mitra agar dapat memenuhi indikator SNI
 - e. Mengikuti juknis dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN
5. BNNK Magelang
- Melakukan Bimtek

Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan

Selain kegiatan – kegiatan yang masuk dalam DIPA, BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNNK di wilayah Jawa Tengah bekerjasama dengan Lapas untuk menjalankan program rehabilitasi di Lapas, diantaranya Lapas Klas I Semarang (Lapas Kedungpane), Lapas Klas II A Perempuan, Lapas Magelang, Lapas Nusa Kambangan. Program rehabilitasi juga dilaksanakan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Polda Jateng dalam rangka pembinaan terhadap personil penyalah guna narkoba Polda Jateng

8	Sasaran Strategis	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
---	-------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
8	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta jaringan	100%

Definisi Operasional

Melakukan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah tupoksi Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tupoksi tersebut, Seksi Intelijen menggunakan berbagai macam metode guna mendapatkan Peta Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Metode yang digunakan antara lain adalah pengumpulan bahan, keterangan informasi, dan menerima laporan informasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Dari berbagai informasi yang didapatkan, Seksi Intelijen melakukan pengolahan dan analisa baik secara manual atau analisis intelijen berbasis teknologi dari unsur-unsur keterangan. Apabila unsur-unsur keterangan dapat dipertanggung jawabkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti Seksi Intelijen BNNP Jateng dengan membentuk Tim Intelijen untuk melakukan penyelidikan kepada Target.

Dalam melakukan Penyelidikan, Tim Intelijen melakukan pemetaan jaringan dengan menggunakan teknologi yang disediakan oleh Deputi Pemberantasan BNN RI di Jakarta. Selain itu Tim Intelijen juga melaksanakan penyamaran, profiling, pembuntutan dan lain-lain untuk mengetahui seluruh informasi mengenai Target. Seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan rencana dan cara bertindak sehingga memberikan hasil yang optimal.

Hasil

Hasil yang dicapai oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah melakukan ungkap kasus dan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selama Januari – Desember 2022 Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah berhasil melakukan 7 kali ungkap kasus kasus narkoba dengan 15 tersangka tindak pidana narkoba.

Kendala

Kendala yang dihadapi oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja tim analis (contohnya laptop khusus untuk analis) dan tim lapangan (khususnya kebutuhan alat *Direction Finder*), juga kurang nya akses kerjasama yang lebih mudah dengan provider-provider juga meningkatnya penggunaan sosial media sebagai sarana komunikasi yg sulit terdeteksi

Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Seksi Intelijen BNNP Jawa Tengah dalam melakukan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah dengan melakukan pendekatan, penggalangan kepada provider-provider, TNI, POLRI, Bea Cukai, Kantor Pos, instansi-intansi pemerintahan, dan seluruh lapisan masyarakat, juga mengajukan permohonan pengadaan alat *Direction Finder* ke BNN RI.

9	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
9	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	19 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	126,31%

*9 berkas perkara BNNP Jateng, 1 BNNK (Banyumas) 2 berkas perkara, 8 BNNK masing-masing 1 berkas perkara.

Definisi Operasional

Melakukan proses penyidikan dalam kelengkapan berkas perkara dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai proses penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan.

Hasil

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang sudah P-21 periode Januari s.d Desember 2022 ada 12 berkas yang ditangani BNNP dan 12 berkas yang ditangani BNNK.

Berkas yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 3 berkas perkara oleh penyidik BNNP Jawa Tengah dan 4 berkas perkara oleh BNNK Batang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 13
DATA LAPORAN KASUS NARKOTIKA BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	SATKER BNNP/BNNK	LKN	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
1	BNNP JAWA TENGAH	LKN /0007- NAR/III/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Hardiman Als Gentho Bin Pawiro Ahmadi	P-21	Maret 2022	Juni 2022
			2 Aziz Darsono Als Pentet Als Jipong Bin Sartono	P-21	Maret 2022	Mei 2022
		LKN /0009- NAR/IV/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Lilik Muh Saeroji Als Kuntet Bin (Alm) Salamun	P-21	April 2022	Juli 2022
			2 Rudi Kiswanto Bin Fahrudin	P-21	April 2022	Juli 2022
			3 Sutoni Als Yohanes Sutoni Als Toni Bin Basyanto	P-21	April 2022	Juli 2022
			4 Widha Surya Ning Tyas Binti Prihono	P-21	April 2022	Juli 2022
			5 Syarif Wahyudi Als Kebo Bin M. Sardju	P-21	April 2022	September 2022
		LKN /0014- NAR/VI/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Heru Hestrada Bin Syopian (alm)	P-21	Juni 2022	Oktober 2022
		LKN /0015- NAR/VII/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Adi Ismanto Alias Adi Bin Wiryadinata	P-21	Juli 2022	November 2022
			2 Wahyu Eka Pradipta Alias Dipta Bin (Alm) Bambang Sardjito	P-21	Juli 2022	November 2022
		LKN /0016- NAR/IX/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Fajar Lilik Pristianto Als Lilik Bin Joko Sarwono	P-21	September 2022	November 2022

NO	SATKER BNNP/BNNK	LKN	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
		LKN /0018- NAR/IX/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Ahmad Faisol Bin (Alm) Ahmad Tohir	P-21	September 2022	November 2022
		LKN /0021- NAR/XI/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Ilham Hanotama Bin Supriyono	Proses sidik	November 2022	-
			2 Bayu Kurniawan Bin Sutarjo	Proses sidik	November 2022	-
			3 Andri Wijanarko putra dari Wijanarko	Proses sidik	November 2022	-
2	BNN KABUPATEN KENDAL	LKN /0017- NAR/IX/2022/BNN Kab. Kendal	1 Khalid Abdul Majid Bin Besariah	P-21	September 2022	Oktober 2022
3	BNN KABUPATEN BATANG	LKN /0008- NAR/III/2022/BNN Kab.Batang	1 Dodo Widy Harto Bin Edi Sumaryo	P-21	Maret 2022	Juni 2022
			2 Qomaruzzaman Als Uma Als Komeng Bin (Alm) Mochamad Basyari Hajar	P-21	Maret 2022	Juni 2022
			3 Wawan Kurniawan Als Cawang Als Gendo Friend Bin Supaeni	P-21	Maret 2022	Juni 2022
4	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	LKN/0003- NAR/I/2022/BNNK PBG	1 Handy Pragunanto Als Handy Bin Tukiman	P-21	Januari 2022	Maret 2022
5	BNN KABUPATEN BANYUMAS	LKN/0005- NAR/I/2022/BNNK BMS	1 Fauzan Ashari Als Ozan Bin Mukisno	P-21	Februari 2022	Maret 2022
		LKN/0006- NAR/I/2022/BNNK BMS	2 Riki Mujiono Bin Ahmad Supendi Wasrip	P-21	Februari 2022	Maret 2022
6	BNN KABUPATEN CILACAP	LKN/0013- NAR/I/2022/BNNK Cilacap	1 Muh Ali Fahrudin Bin Supadi	P-21	Juni 2022	Agustus 2022
7	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	LKN/0020- NAR/XI/2022/BNNK Temanggung	1 Dariyono Bin (Alm) Radin	Proses sidik	November 2022	-
			2 Budi Siswanto Bin (Alm) Saboeloen	Proses sidik	November 2022	-
8	BNN KOTA TEGAL	LKN/0011- NAR/VI/2022/BNN Kota Tegal	1 Abdul Kharis Als Dul Als Mbah Dul Bin Sofwani (alm)	P-21	Juni 2022	September 2022
9	BNN KOTA SURAKARTA	LKN/0001- NAR/I/2022/BNNK SKA	-	-	-	-
		LKN/0002- NAR/I/2022/BNNK SKA	1 Dio Nurul Huda Widodo Als Bani Bin Joko Widodo	P-21	Januari 2022	Maret 2022
		LKN/0019- NAR/IX/2022/BNNK Surakarta	1 Yohanes Fadli Kurniawan Als Pitik Bin Bambang Widodo	Proses sidik	September 2022	-

NO	SATKER BNNP/BNNK	LKN	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
			2 Ranjid Pramana Putra Bin (Alm) Bambang Sri Purnomo	Proses sidik	September 2022	-
10	BNN KABUPATEN MAGELANG	LKN 03 (LIMPAHAN DARI BNNP DIY)	1 Andika Prastiwiyana Bin Prayitna	P-21	Januari 2022	Mei 2022
			2 Zaenal Arifin Als Ipin Bin Zazid Rifai			
		LKN /0010-NAR/V/2022/BNNK MGL	1 Adi Darmawan Suryanto	P-21	Mei 2022	Juli 2022

Kendala

Dalam proses pengembangan penyidikan terhadap atasan/bos tersangka menemui kesulitan karena penggunaan sosial media (whatsapp, dll) sebagai alat komunikasi yg menghambat deteksi komunikasi tersangka dengan atasannya. Dalam 1 Jaringan antar tersangka tidak mengenal secara fisik.

Strategi

Koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Labfor Forensik ataupun lainnya, juga peningkatan kemampuan bagi anggota lapangan dan penyidik.

10	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
10	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100%

Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan

Definisi Operasional

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- a. Melaksanakan perawatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng dalam kasus P4GN.
- b. Melaksanakan pengawasan dalam waktu 1x24 jam selama tersangka ditahan di BNNP Jateng.
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditahan di BNNP Jateng secara berkala terhadap tahanan dari peralatan mandi, pakaian dan keperluan yang lain.
- d. Pemberian kebutuhan makanan dan minuman (3x / hari) secara rutin.
- e. Melaksanakan sidak terhadap tahanan yang ditahan di BNNP Jateng.

Hasil

Pada periode bulan Januari s.d Desember 2022, kegiatan yang telah dilaksanakan sie Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas pengiriman tersangka guna penitipan selama proses penyidikan.
- b. Melaksanakan tugas pengambilan tersangka guna penyerahan tersangka dan BB kepada JPU .
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada semua tahanan.
- d. Melaksanakan pengawasan selama tersangka ditahan di BNNP Jateng

Tabel 14
JUMLAH TAHANAN YANG DITAHAN DI RUTAN BNNP

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH TSK	KET
1	BNNP Jawa Tengah	12	Tindak Pidana Narkotika
		3	TPPU
2	BNNK Surakarta	3	Tindak Pidana Narkotika
3	BNNK Temanggung	2	Tindak Pidana Narkotika
4	BNNK Batang	3	Tindak Pidana Narkotika
	TOTAL	23	

Kendala

- a. Dalam melaksanakan perawatan, pengawasan tahanan sarana dan prasarannya serba terbatas, khususnya petugas jaga.
- b. Medis yang ada di BNNP Jateng kurang cepat dalam menangani tahanan apabila mengalami gangguan kesehata karena belum ada dokter khusus yang menangani tahanan.

- c. Anggaran tahanan yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tahanan yang melebihi target.
- d. Banyaknya permintaan Layanan Asesmen Terpadu (TAT) yang melebihi target anggaran. Target awal tahun 40 layanan. Sudah melayani 118 layanan.

Strategi

- a. Berupaya untuk berkoordinasi dengan Pegadaian, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas dan Kejaksaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan piket jaga tahanan harian oleh semua anggota bidang pemberantasan di bantu anggota k-9 dan security.
- c. Berupaya untuk berkoordinasi dengan Pegadaian, Poliklinik/Rumah Sakit, Lapas dan Kejaksaan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- d. Mengajukan permohonan penambahan anggaran Layanan Asesmen Terpadu (TAT).

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba

Definisi Operasional

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

- a. Melaksanakan pendataan, pengamanan dan pengawasan barang bukti berupa narkoba dan non narkoba.
- b. Melaksanakan penyimpanan barang bukti narkoba dalam almari brankas.
- c. Melaksanakan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh instansi terkait (Balai POM, Kejaksaan, Puslabfor Polri, Ditresnarkoba dan Dinas Kesehatan)

Hasil

Pada periode bulan Januari s.d Desember 2022, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- b. melaksanakan tugas pengawalan dan pengiriman BB Narkotika dalam proses penyidikan
- c. melaksanakan tugas pengamanan BB dlm proses penimbangan BB Narkotika guna penimbangan BB.
- d. melaksanakan 3 kali pemusnahan BB Narkotika selama Januari s.d Desember 2022.
- e. melakukan pendataan barang bukti.

Kendala

- Kurangnya personel Pengawas Barang bukti di BNNP Jateng, sehingga pengawasannya masih dibantu oleh personel dari lain seksi khususnya staff sie penyidik dan staf intelijen.
- Belum adanya ruangan khusus yang digunakan untuk pengamanan dan penyimpanan brankas barang bukti.

Strategi

- Mengajukan permohonan ke bagian umum agar dapat dibuatkan ruangan khusus penyimpanan barang bukti.
- Berupaya untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri/Tinggi, Pengadilan Negeri/Tinggi dan Lapas demi kelancaran proses Penyidikan sampai Barang bukti dimusnahkan dihadapan instansi berwenang.

11	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
11	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas	2 Berkas	100%

Definisi Operasional

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan setelah mendapat bukti-bukti Laporan Hasil Analisis dari PPATK ataupun setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Analisis terlebih dahulu ataupun penyelidikan terhadap aset-aset tersangka narkoba. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh Penyidik adalah berupa penelitian laporan hasil analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

Hasil

Jumlah tindak pidana pencucian uang yang ditangani BNN Provinsi Jawa Tengah sudah P-21 adalah 2 berkas perkara. Sedangkan dalam proses penyidikan sejumlah 1 (satu) berkas perkara.

Tabel 15
DATA CAPAIAN BERKAS TPPU

NO	SATKER	LKN	TERSANGKA	STATUS	BULAN LKN	BULAN P-21
1	BNNP JAWA TENGAH	LKN /0004-TPPU/I/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Mujiono Bin (Alm) Siswanto	P-21	Maret 2022	Mei 2022
		LKN /0012-TPPU/VI/2022/BNNP Jawa Tengah	1 Andhi Widiarti Binti Edy Wiyono	P-21	Juni 2022	Oktober 2022
			2 Slamet Teguh Wahyudi Bin (Alm) Suwandi	Proses sidik (Tahap I)	Juni 2022	-

Kendala

Kerjasama dengan beberapa Bank yang belum terjalin sempurna menghambat proses penyidikan dan pengembangan kasus dalam rangka pencarian aset tersangka, dan beberapa instansi yang belum mempunyai MOU dengan BNN terkait TPPU contohnya BPN dan POLDA.

Strategi

Koordinasi yang baik dengan instansi - instansi terkait dalam menunjang kelancaran penyelesaian proses berkas perkara baik itu di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPATK, pihak Bank, BPN, POLDA dan lembaga keuangan lainnya terkait penelusuran aset.

12	Sasaran Strategis	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
-----------	--------------------------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
12	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	89	81,74	91,84%
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	8 BNN Kabupaten/ Kota	88,88%

Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah

Definisi Operasional

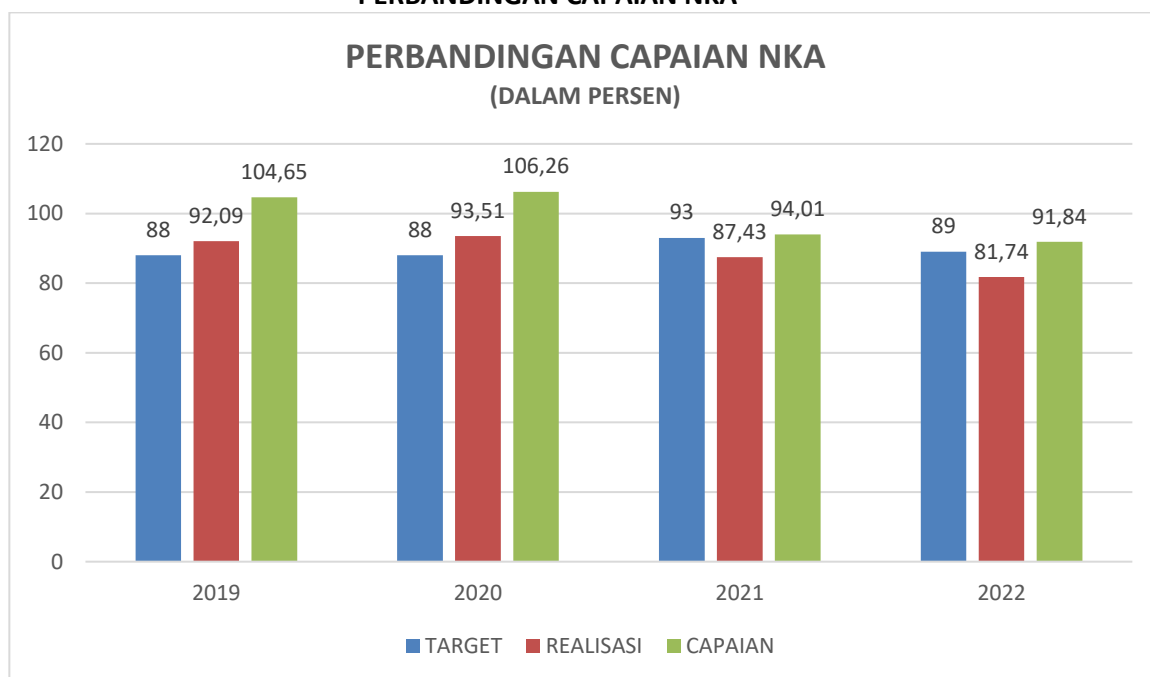
Nilai Kinerja anggaran adalah nilai aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran kinerja anggaran kementerian dan lembaga. Nilai kinerja anggaran BNN merupakan nilai akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja aspek Implementasi satker yang ada di aplikasi

smart Kemenkeu selama 1 (satu) tahun hingga menjadi capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah beserta BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, terdiri dari aspek penyerapan anggaran, konsistensi atas RPD baik awal maupun akhir, capaian keluaran/output dan efisiensi.

Hasil

Realisasi kinerja anggaran sudah terukur dan terdeteksi di aplikasi SMART Kemenkeu, belum terealisasinya anggaran secara maksimal dikarenakan ada beberapa anggaran di BNNP Jawa Tengah tidak dapat terserap. Apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

Tabel 16
PERBANDINGAN CAPAIAN NKA



Sebagai tindak lanjutnya maka di tahun yang akan datang perlu meningkatkan efisiensi anggaran dan meningkatkan capaian output.

Kendala

Belum adanya penilaian terkait aspek manfaat.

Strategi

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan

Jumlah BNN Kabupaten/ Kota Di Wilayah Provinsi Dengan Nilai Kinerja Anggaran

Mencapai Target

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
----	-------------------	--------	-----------	---

	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	8 BNN Kabupaten/ Kota	88,88%
--	--	-----------------------	-----------------------	--------

Tabel 17
DATA CAPAIAN NKA BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	SATKER	TARGET	REALISASI
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	89	81,74
2	BNN Kabupaten Kendal	87	85,62
3	BNN Kabupaten Batang	87	87,20
4	BNN Kota Tegal	87	88,40
5	BNN Kabupaten Cilacap	87	87
6	BNN Kabupaten Temanggung	88	94,52
7	BNN Kabupaten Banyumas	87	93,12
8	BNN Kabupaten Purbalingga	93	94,27
9	BNN Kabupaten Magelang	93	98,65
10	BNN Kota Surakarta	87	93,48

Realisasi kinerja anggaran sudah terukur dan terdeteksi di aplikasi SMART Kemenkeu, belum terealisasinya anggaran secara maksimal dikarenakan ada beberapa anggaran di BNNP Jawa Tengah tidak dapat terserap.

13	Sasaran Strategis	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----------	--------------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	95	97,03	103,22%
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	9 BNN Kabupaten/ Kota	9 BNN Kabupaten/ Kota	100 %

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah

Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, Kesalahan SPM.

Terselesaikannya kegiatan program dan anggaran Tahun 2022 di BNN Provinsi Jawa Tengah karena:

- Optimalisasi anggaran yang diikuti dengan revisi anggaran yang tepat melalui koordinasi dengan BNN RI dan Bagian/ Bidang yang ada di BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Konsultasi yang intensif dengan KPPN Semarang II;
- Komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan.

Tabel 18
PERBANDINGAN CAPAIAN NKA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	134	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	82.20	100.00	89.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.28	0.00	85.00	92.17	95%	97.03
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.11	5.00	8.90	8.00	5.00	5.00	15.00	10.00	17.00	4.91	0.00	4.25			
				Nilai Aspek	94.07			97.25				99.57				85.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNNK Jajaran seluruhnya mencapai target sebesar 95.

Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target

Tabel 19
CAPAIAN IKPA BNNP DAN BNNK JAJARAN

NO	SATKER	TARGET	REALISASI
1	BNN Provinsi Jawa Tengah	95	97,03
2	BNN Kabupaten Kendal	95	96,97
3	BNN Kabupaten Batang	95	97,70
4	BNN Kota Tegal	95	98,90
5	BNN Kabupaten Cilacap	95	98,52
6	BNN Kabupaten Temanggung	95	97,42
7	BNN Kabupaten Banyumas	95	97,52
8	BNN Kabupaten Purbalingga	95	97,81
9	BNN Kabupaten Magelang	95	97,48
10	BNN Kota Surakarta	95	98,55

Dengan capaian tersebut maka target jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA memenuhi target adalah sebanyak 9 (sembilan) BNN Kabupaten/Kota.

B. Akuntabilitas Keuangan

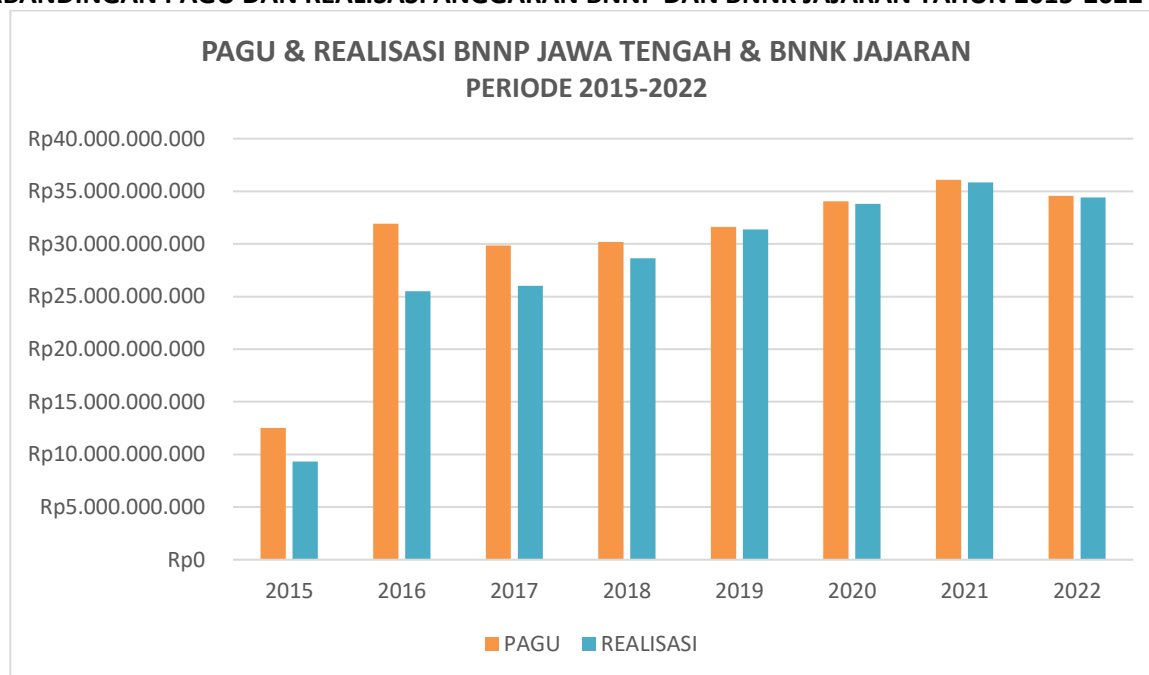
Tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah beserta BNNK jajaran mendapatkan alokasi anggaran (sesuai Pagu Anggaran di Perjanjian Kinerja BNNP Jawa Tengah) sebesar **Rp.35.937.944.000,-** (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan setelah Refocusing menjadi sebesar **Rp 34.569.055.000,-** (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran **Rp. 34.401.700.237,-** (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 99,51%.

Tabel 20
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2022

TAHUN	PAGU	REALISASI	%	SISA
2015	Rp 12.506.428.000	Rp 9.338.762.642	74,67	Rp 3.167.665.358
2016	Rp 31.933.874.000	Rp 25.500.844.590	79,86	Rp 6.433.029.410
2017	Rp 29.843.440.000	Rp 26.023.927.726	87,20	Rp 3.819.512.274
2018	Rp 30.192.814.000	Rp 28.636.132.286	94,84	Rp 1.556.681.714
2019	Rp 31.624.745.000	Rp 31.380.817.318	99,23	Rp 243.927.682
2020	Rp 34.057.527.000	Rp 33.817.608.994	99,30	Rp 239.918.006
2021	Rp 36.102.231.000	Rp 35.837.883.168	99,27	Rp 264.347.832
2022	Rp 34.569.055.000	Rp 34.401.700.237	99,51	Rp 167.354.763

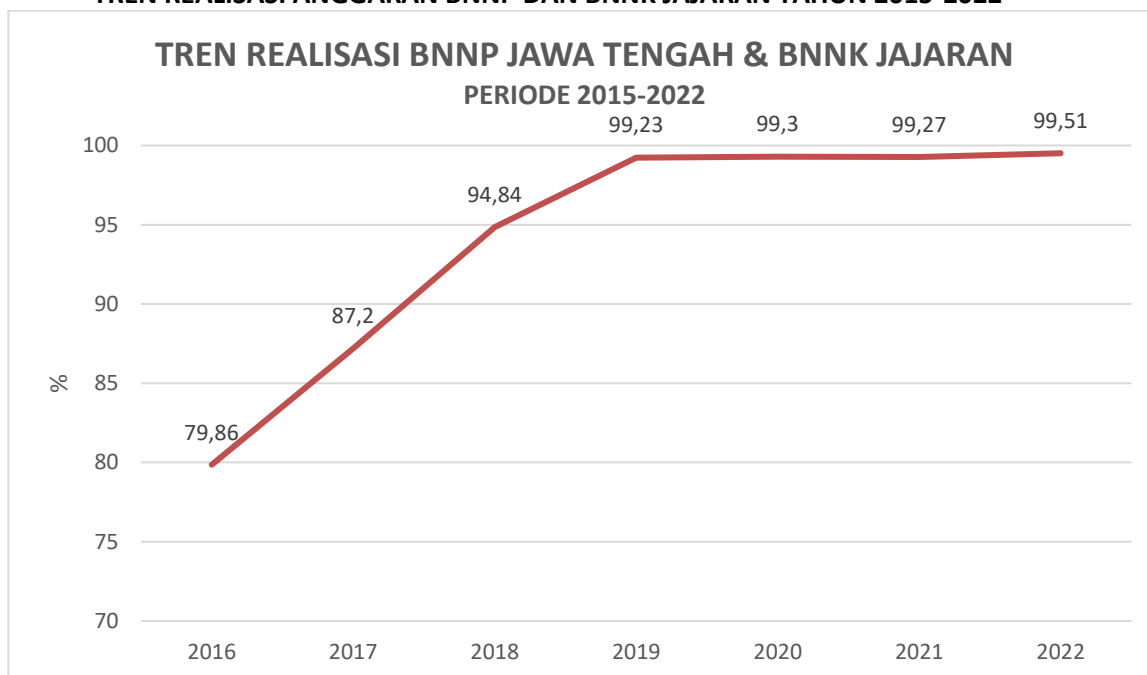
Sejak tahun 2015 hingga 2022 baik secara pagu maupun realisasi anggaran, BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Tabel 21
PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2022



Jika dilihat dari sudut pandang realisasi secara presentase sejak tahun 2015 hingga 2022 BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya namun mengalami sedikit penurunan seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Tabel 22
TREN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN TAHUN 2015-2022



Selain itu capaian 4 tahun terakhir selalu mencapai di atas 99% melebihi target yang ditetapkan oleh BNN RI dan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi tantangan ke depannya dikarenakan BNNP Jawa Tengah harus bisa mempertahankan capaian tersebut.

Tabel 23
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BNNP DAN BNNK JAJARAN PER KEGIATAN

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	750.134.000	749.773.000	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten /Kota	9 Kabupaten /Kota
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	1.152.188.000	1.142.785.586	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten /Kota	9 Kabupaten /Kota
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	1.788.1490.000	1.787.208.920	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten /Kota	9 Kabupaten /Kota
4	Kegiatan Penyelenggaraan	201.326.000	201.243.000	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih	2 Kawasan	2 Kawasan

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Pemberdayaan Alternatif			status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"		
				Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3,40	3,25
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	278.391.000	277.683.275	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang	65 Orang
				Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	8 Orang
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1.411.397.000	1.360.598.085	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga	5 Lembaga
				Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit	13 Unit
7	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	173.658.000	172.489.000	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	3,40 Indeks	3,488 Indeks
8	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	204.598.000	204.597.872	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	1 Peta Jaringan
9	Kegiatan Penyelidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	1.112.484.000	1.112.272.059	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	19 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	631.085.000	617.579.560	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks
				Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100 Indeks
11	Kegiatan Penyidikan tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	378.000.000	377.996.086	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara
12	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	13.692.599.000	13.671.218.897	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	89 Indeks	81,74 Indeks
13	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	263.651.000	250.351.587	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 BNN Kabupaten /Kota	8 BNN Kabupaten /Kota

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
14	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	204.155.000	201.486.356	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	95 Indeks	96,56 Indeks
15	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	12.145.611.000	12.092.989.304	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 BNN Kabupaten /Kota	9 BNN Kabupaten /Kota
16	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	181.588.000	181.427.850			
JUMLAH		34.569.055.000	34.401.700.237			

BAB IV PENUTUP

BNN Provinsi Jawa Tengah secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2022 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BNN RI yang berisi 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja, tingkat capaiannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu:
 - a. Capaian **melebihi target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 8 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	225%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	225%
3	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	108%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	125%
5		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	108,3%
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Tengah	102,58%
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	126,31%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Tengah	101,64%

b. Capaian **sesuai target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 7 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	100%
2	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100%
3	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan preskursor narkoba yang berhasil dipetakan	100%
4	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100%
5		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100%
6	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	100%
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	100%

c. Capaian yang **kurang/dibawah dari target** kinerja yang ditetapkan sebanyak 4 indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	95,58%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN
2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitas	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	80%
3	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Tengah	91,84%
4	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	88,88%

2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:
 - a. Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja.
 - b. Adanya kesempatan yang luas untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa Pendidikan pelatihan/bimtek bagi seluruh personil BNN Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Optimalisasi koordinasi dan Kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Peningkatan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. PURWO CAHYOKO, M.Si

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**


Drs. PURWO CAHYOKO, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

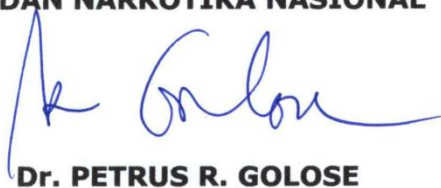
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3.40 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	4 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	12 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.40 Indeks
11	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	19 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	9 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.841.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.1.253.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.1.989.965.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.209.400.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.305.201.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.187.402.000

7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.186.780.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.235.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.1.200.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.594.885.000
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.420.000.000
12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.13.829.147.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.231.254.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.339.527.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.12.487.160.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.260.000.000

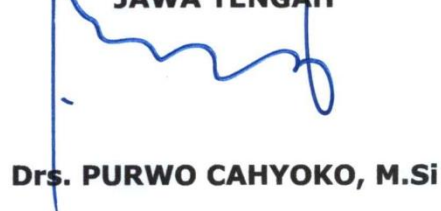
Pihak Kedua,
KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama
KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TENGAH



Drs. PURWO CAHYOKO, M.Si



**BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**

**WARON
DRUGS**

Subbag Perencanaan BNNP Jawa Tengah 2022

#JatengGayengPerangiNarkobaBarengBareng

 @BnnProvJateng |  BNN Provinsi Jawa Tengah |  BNN PROV JATENG |  infobnn_prov_jawatengah |  bnn_provinsi_jawatengah